# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Dalam menjalankan roda kepemerintahannya setiap negara selalu berpedoman pada kebijakan politik yang dianut Negara itu, sehingga prosedur birokrasi yang di tempuh juga mengacu kepda paradigma sistem politik yang dianutnya. Seiring dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian diperbaikimenjadi undang-undang no 32 tahun 2004, paradigma pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralistik.

Pada kenyataannya desentralisasi diminati banyak orang karena di dalamnya terkandung semangat demokrasi, yang ujungnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk didalamnya penyelengaraan pembangunan (Arif, 2006:23). Dengan demikian, harapan masyarakat dari suatu realita ke realita secara keseluruhan lebih baik, akan tercapai melalui konsep yang lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat nya, sebagaimana falsafah yang terkandung di dalam otonomi daerah tersebut, yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab.

Partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun 60-an ketika berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Presiden Soeharto sejak tahun 1966 menerapkan konsep partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan sesui dengan paradigma pemerintah orde baru yang sentralistik, seluruh kebijakan pembangunan di lakukan secara “top-down”. Inisiatif dalam menetapkan kebijakan berasal dari atas (pejabat berwenang) tanpa melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya. Dalam kaitan ini, masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam membantu dana maupun tenaga. Pada saat itupartisipasi di pandang sebagai proses mobilisasai yaitu penggerakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Meskipun model ini memiliki keunggulan karena pelaksanaan pembangunan dapat di lakukan cepat, namun kelemahan yang di jumpai adalah masyarakat sering merasa tidak memiliki dan merasakanmanfaan dari kegiatan pembangunan itu.

Sejak tahun 1999 dikeluarkan instrument hukum berupa undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah (PP) yang membuka lebar ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrument yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana. Selain undang-undang nomor 32 tahun 2004 , berbagai peraturan yang secara sektoral memberikan ruang bagi partisipasi publik diantara nya undang-undang nomor 25 tahun2004 tentang Sistem Perenccanaan Pembangunan Nasional (SPPN), undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dan masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dan implementasinya.

Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat di beri peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang di programkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang di hadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang di kehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya di bangun sebagai kebutuhan koektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu atau golongan.

Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi (bercirikan top down) mendapat kritikan tajam, dimana kurang peka terhadap kebutuhan lokal Korten (1988:87). Dari pada itu, peleksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya.

Hasil penelitian W.Boyers tahun 1985 menyimpulkan bahwa legitimasi dan keberhasilan dari suatu program pembangunan dalam skala nasional bagi suatu negara berkembang, program yang dilakukan dengan memeperhatikan situasi dilaksanakan dari bawah ke atas (bottom-up), dan program tersebut sesuai bagi rakyat, dari pada dilakukan secara seragam (top-down) dengan program yang di dominasi oleh pemerintah pusat.

Di Indonesia, rencana pembangunan secara nasional diberikan tempat central kepada pembangunan pedesaan. Hal ini disebabkan karena kurang lebih 80% penduduk di Indonesia berdiam di pedesaan. Sehingga dengan demikian, upaya perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan tidaklah lepas dari setiap program pembangunan nasional. Pembangunan desa sebagai bagian integral pembangunan nasional mempunyai arti strategis, karena desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan negara RI yang diukur dalam pembangunan nasional, serta berkaitan dengan kondisi-kondisi sosial masyarakat yang masih terbelakang merupakan tantangan bagi peningkatan kesejaheraan masyarakat yang adil dan merata.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan saran dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karna itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek diluar pedesaan, sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada pada wilayah Kalimantan Timur. Dalam menjunjung kegiatan pembangunannya, maka visi dan misi yang harus dicapai adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah, oleh karena itu dalam menjunjung visi dan misi tersebut, maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa. Terkait hal tersebut kabupaten Kutai Barat telah mengeluarkan berbagai perangkat hukum mulai dari Perda Kabupaten Kutai Barat pasal 6 ayat 1 tahun 2017 tentang peraturan kewenangan desa, Perda Kabupaten Kutai Barat pasal 1 ayat 10 tahun 2017 tentang peraturan desa dan keputusan kepala desa, Perda Kabupaten Kutai Barat pasal 7 ayat 1 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Perda Kabupaten Kutai Barat pasal 8 ayat 1 tahun 2017 tentang sumber pendapatan desa.

Namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah keatas ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa didengar. Begitupun hal nya dalam pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan sistem tender, dimana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembanguan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat di kritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari forum koordinasi ditingkat lebih rendah (desa) kadang tidak di gubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musrenbang desa hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat dari pada sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud.

Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya proses pembangunan yang melibatkan masyarakat di dalamnya (partisipatif). Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa macetnya pembangunan partisipatif akan memunculkan pola-pola pembangunan yang aspiratif.

Hal tersebut diatas kemudian memunculkan pertanyaan di Kabupaten Kutai Barat, khususnya di desa Geleo Baru kecamatan Barong Tongkok bahwa apakah partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan telah terlaksana dengan baik, dimana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, akan tetapi telah menjadi subjek pembangunan dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksananaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri musrenbang, akan tetapi bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah, serta bagaimana proses pelibatan mereka baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pembangunannya. Karna antusiasme masyarakat kemudian lahir ketika substansi dari proses pembangunan itu telah tercipta.

Melalui penelitian awal, ditemukan bahwa meski dalam pelaksanaan pembangunan yang telah terlaksana di desa Geleo Baru masih belum mencapai substansi pembangunan partisipatif baik itu dalam tahap perncanaan sampai pada tahap pelaksanaan khususnya dalam partipasi tenaga, namun setelah adanya beberapa program pemberdayaan masyarakat di desa tersebut, semangat partisipasi masyarakat kembali tumbuh. Beberapa program tersebut telah memunculkan kembali semangat gotong royong masyarakat, terutama program PNPM Mandiri Pedesaan.

Berdasar pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam judul: “Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Di Desa Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat”.

## Rumusan Masalah

Perumusan masalah sangat penting dalam suatu penelitian agar diketahui arah jalan penelitian tersebut. Arikunto (1993:17) menguraikan bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya, sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi, dan dengan apa ia melakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Partisiapatif Masyarakat Di Desa Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat?”.

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Dengan demikian, pada dasarnya tujuan penelitian memberikan informasi mengenai apa yang akan diperoleh setelah selesai melakukan penelitian (Hasan,2002:44).

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yakni: “Untuk mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.’

## Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1.4.1. Secara Praktis**

yakni memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati jalan nya implementasi perencanaan partisipatif, serta memberikan masukan bagi masyarakat khususnya ditempat penelitian ini dilaksanankan agar dapat terus meningkatkan peran aktifnya dalam membangun daerahnya.

**1.4.2. Secara Akademis**

yakni penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak bagi keputusan jurusan Ilmu Administrasi dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian model tentang partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan di daerah lain.

# BAB II

# KERANGKA DASAR TEORI

## 2.1. Teori Dan Konsep

Sebagai titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah, maka perlu adanya pedoman teoritis yang dapat yang dapat membantu. Landasan teori perlu ditegaskan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukuan sekedar perbuatan yang sifatnya coba-coba (trial and error), (sugiyono, 2004:55).

Menurut Hoy & Miskel (dalam Sugiyono,2004:55) teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan darri sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilihnya. Sehubungan dengan itu, maka berikut akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yang meliputi konsep kebijakan.

### 2.1.1. Konsep Pelaksanaan

Secara sederhana, pelaksanaan bisa juga disebut sebagai implementasi. Majone dan wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70), mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh mclaughin (dalam Nurdin dan Usman,2004). Adapun schybert (dalan Nurdin dan Usman, 2002:70), mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

### 2.1.2. Pengertian Pembangunan

Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000:20), mendifinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (2000:21), definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:

1. Life sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dadsar,
2. Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai,dan tidak “diisap” orang lain.
3. Freedomfrom servitude : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar diatas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi popular (Todaro, 2000:24), yaitu:

1. Copacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas.
2. Equity, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
3. Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
4. Susitanable,halini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Menurut Rostow dalam Arief (1996:29) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh suatu sektor atau lebih (Arief,1996:30).

Menurut Gant dalam Suryono (2001:31), tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Saint (dalam Suryono, 2001:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dibatalkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu. Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, tercipta control terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akanmenciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.

Pembangunan dapat diartikan sebagi suatu usaha sadar dlam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu negara.

Sondang P.Siagian, (1981:21) mendefinisikan pembangunan adalah:

“Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam usaha pembinaan bangsa.”

### 2.1.3. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh R.A Santoso Sastropoerto (1988:13) sebagai berikut:

“Parisipasi dapat didefinisikan sebagi keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.”

“Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih dari pada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu:

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsurr tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekrejaan atau tugas saja, dan ketiga unsur partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain, tetapi akan saling menunjang.

Dalam realitanya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering dikaitkan dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Susanto S. Hamidjoyo (1988:67), bahwa partisipasi mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan.
2. Menerima kembali hasil pembangunan dan tanggung jawab terhadapnya,
3. Partisipasi berarti terwujudnya kreativitas dan aktivitas.

Dari ketiga hal tersebut di atas, jelas bahwa masalah partisipasi ini sangat urgent, lebih-lebih dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu partisipasi aktif segenap lapisan dalam pembangunan harus semakin luas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan maupun di dalam menerima hasil pembangunan.

Dari beberapa kajian literatur tentang partisipasi masyarakat negara-negara berkembang menunjukkan bahwa konsep partisipasi diintrepretasikan secara luas.

Oakley (1991:1-10) mengartikan partisipasi ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Partisipasi sebagai bentuk kontribusi, yaitu interpretasi dominan dari partisipasi dalam pembangunan di dunia ketiga adalah melihatnya sebagi suatu keterlibatan secara sukarela atau bentuk kontribusi lainnya dari masyarakat desa menetapkan sebelumnya program dan proyek pembangunan.
2. Partisipasi sebagai organisasi, meskipun diwarnai dengan perdebatan yang panjang diantara para praktisi dan teoritisi mengenai organisasi sebagai instrumen yang fundamental bagi partisipasi, namun dapat dikemukakan bahwa perbedaan organisasi dan partisipasi terletak pada hakekat bentuk organisasional sebagai sarana bagi partisipasi, seperti organisasi-organisasi yang bisa dibentuk atau organisasi yang muncul dan dibentuk sebagai hasil dari adanya proses partisipasi. Selanjutnya dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dapat melakukannya melalui beberapa dimensi yaitu:
3. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan).
4. Sumbangan materi (dana, barang, alat).
5. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja).
6. Partisipasi sebagai pemberdayaan, partisipasi merupakan latihan pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit didefinisikan. Akan tetapi, pemberdayaan merupakan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.

Menurut Soetrisno (1995:2211-222) bahwa secara umum, ada tiga jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat, yaitu:

1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini pun diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan.
2. Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.
3. Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun diwilayahnya. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu.

Definisi mana yang dipakai akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengembangkan dan memasyarakatkan sistem pembangunan wilayah yang partisipatif. Dalam sosiologi definisi pertama merupakan suatu bentuk lain dari mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pembangunan masyarakat. Menurut Adi (2001:208), partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap Asessement

Dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

1. Tahap Alternativ Program atau Kegiatan

Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan.

1. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input,proses, dan hasil)

Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan.

Dari beberapa definisi yang telah di sebutkan diatas, maka dalam penelitian ini definisi partisipasi masyarakat yang dimaksudkan oleh peneliti, yakni keikutsertaan/keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dengan memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus sebagi objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi di daerahnya sendiri, sehingga pembangunan yang nantinya dilaksanakan di daerah betul-betul seperti yang mereka butuhkan.

### 2.1.4. Unsur-Unsur Partisipasi

Menurut Keith Davis (Sastropoerto, 1988:14) di dalam pengertian partisipasi ini terdapat tiga unsur penting sehingga memerlukan perhatian yang khusus yaitu:

1. Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Unsur kedua adalah kesediaan memberikan sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok.
3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas, maka partisipasi tidak saja identik dengan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan dan tugas saja akan tetapi menyangkut keterlibatan diri atau ego,sehingga akan timbul tanggung jawab dan sumbangan yang besar dan penuh terhadap kelompok.

### 2.1.5. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat

Selanjutnya Keith Davis (Satropoerto, 1988:55) mengemukakan pula tentang bentuk partisipasi, yaitu:

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang.

Mendirikan proyek yang sifatnya berdiri dikaki diatas kaki sendiri dan honornya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang berada di luar lingkungan tertentu (dermawan atau pihak ketiga), dan itu merupakan salah satu partisipasi dan lansung akan disiarkan oleh masyarakat itu sendiri dalam pembangunan desa tersebut.

Mendirikan proyek yang sifatnya berdiri diatas kaki sendiri dan dibiayai sepenuhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh komuniti dalam rapat desa yang menentukan anggarannya).

Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat. Bentuk kerja yang disumbangkan oleh masyarakat akan memperingan pembangunan yang diselenggarakan desa tersebut.

1. Aksimasa.
2. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri.
3. Membangun proyek komuniti yang sifatnya otonom.

Dalam hal partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa, Ndraha (1982:82)

juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi yaitu sebagai berikut:

1. Partispasi dalam bentuk swadaya murni dari masyarakat dalam hubungan dengan pemerintah desa, seperti jasa/tenaga, barang maupun uang.
2. Partisipasi dalam penerimaan/pemberian informasi.
3. Partisipasi dalam bentuk pemberian gagasan.
4. Partisipasi dalam bentuk menilai pembangunan.
5. Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan operasional pembangunan.

Dari uraian diatas jelaslah kiranya partisipasi masyarakat pembangunan desa sangat luas bahkan dalam hal perumusan, perencanaan, pengawasan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan pun perlu dilibatkan.

Pembangunan yang dilakukan dipedesaan harus terpadu dengan Terpadu disini dimaksudkan keterpaduan antar pemerintah dan masyarakat, antara sektor yang mempunyai program pedesaan dan antara anggota masyarakat sendiri, hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Darjono (Sastropoetro, 1988:19) bahwa:

“Partispasi masyarakat dilakukan dalam bentuk swadaya gotong royong merupakan modal utama dan potensi yang esensial dalam pelaksanaan pembangunan desa yang selanjutnya tumbuh dan bekembang menjadi dasar kelangsungan pembangunan nasional.”

Mengingat partisipasi yang memiliki kemampuan mentransformasikan suatu kelompok yang dinamis yang menjadi motor penggerak setiap perubahan. Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh Webber (Abdullah,1997:18) bahwa:

“Betapa kelompok masyarakat dapat menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat di dalam menggerakkan berbagai perubahan kearah kemajuan. Masyarakat dengan cirri-ciri khusus seperti kelompok yang memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap peran aktif individu di dalam kehidupan bernilai tinggi merupakan kekuatan perubahan yang dapat merubah tata kehidupan sosial, ekonomi dan politik”.

Oleh karena itu, peranan masyarakat dalam pembanguanan sangatlah besar. Agar perannya efektif perlu diwadahi melalui lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Cara mengefektifkan partisipasi masyarakat utamanya pada masyarakat lapisan bahwa menurut Sastropoetro (1988:23) adalah sebagai berikut:

1. Inventarisir semua jenis kader yang ada di desa, guna untuk mengetahui kemampuan tenaga yang dimiliki.
2. Inventarisir kegiatan dan tujuan program masing-masing kader. Setelah terhimpun data kegiatan dan tujuan program dari masing-masing kader, data diolah dan disimpulkan untuk memperoleh rencana lokasi kegiatan, program kegiatan serta jangkauan keberhasilan.
3. Rencana kegiatan pelaksanaan program agar dicek pada mekanisme

penyusunan dan pelaksanaan kegiatan program pembangunan telah masuk dalam rencana keputusan desa.

Tindak lanjut hasil program kegiatan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah dengan motor penggeraknya nya adalah kader, memerlukan pembinaan yang berkesinambungan.

Dengan demikian sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting sekali dalam usaha mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik maupun nonfisik. Disamping untuk mengsukseskan pembangunan, proses penyusuanan dan pelaksanaan harus direncanakan dengan matang, dengan melibatkan komponen masyarakat, sehingga tujuan pembangunan akan tercapai.

**Jenis-jenis partisipasi**

Menurut Keith Davis, seperti yang di kutip oleh sastropoetro (1988:16), mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Pikiran (psycologicakal participation).
2. Tenaga (physical participation).
3. Pikiran dan tenaga (psychological dan physical participation).
4. Keahlian (participation with skill).
5. Barang (material partisipation).
6. Uang (money participation).

Selanjutnya, sherry R. Arnstein dalam Suryono (2001:127) memberikan model delapan anak tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation). Hal ini bertujuan untukmengukur sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat di sebuah negara.

Dalam penelitian yang akan dilakukan terkait dengan judul karya ilmiah ini dan dengan melihat model partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka model partisipasi masyarakat yang dimaksud, yakni partisipasi dalam bentuk sumbangan pikiran dalam merencanakan program/proyek pembangunan yang akan dilaksanakan didaerahnya.

### 2.1.6. Prasyarat Partisipasi

Menurut Davis dalam Sastropoetro (1988:16-18) prasyarat untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif adalah sebagi berikut:

1. Adanya waktu.
2. Kegiatan partisipasi memerlukan dana perangsang secara terbatas.
3. Subyek partisipasi hendaklah berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya.
4. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam arti kata yang bersangkutan memiliki pemikiran dan pengalaman yang sepadan.
5. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal baik.
6. Bebas melaksanakan peran serta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
7. Adanya kebebasan dalam kelompok, tidak adanya pamaksaan atau penekanan.

Selanjutnya Hamidjojo dan Iskandar (1974) dalam Sastropoetro (1988:29) mengemukakan sebagai berikut:

1. Senasib dan sepenanggungan.
2. Keterlibatan terhadap tujuan hidup
3. Kemahiran untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan.
4. Adanya prakarsawan.
5. Iklim partisipasi.
6. Adanya pembangunan itu sendiri.

Dari kedua rumusan diatas pada dasarnya di dalam berpartisipasi, partisipan hendaknya mempunyai suatu kemampuan yang dapat disumbangkannya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Partisipasi didasari pula oleh adanya kecocokan atau kebutuhan dari partisipan itu sendiri kebutuhan mereka, maka mereka berpartisipasi memanfaatkan dan memelihaaranya.

Partisipasi masyarakat terhadap pelaksaan kebijakan publik merupakan proses dan wujud partisipasi politik masyarakat didalam kehidupan bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat akan menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik. Besarnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan kesadaran politik masyarakat di dalam suatu negara. Pantingnya partispasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik menunjukkan publik yang ditetapkan oleh pemetintah akan sesuai dengan kehendak masyarakat.

### 2.1.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat, baik berupa faktor pendorong maupun faktor penghambatnya. Faktor pendorong yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Subrata dan Atmaja dalam sopino (1998:32) adalah sebagai berikut:

1. Adanya interes dan partisipan.
2. Hadiah dari suatu kegiatan.
3. Adanya keuntungan dari kegiatan.
4. Motivasi dari luar.

Selanjutnya terdapat pula faktor lain yang dapat mewarnai dan turut berperan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat yaitu pemuka masyarakat, seperti dikemukakan Mutadi dalam Sopino (1988:33) sebagai berikut:

“Dalam pembangunan masyarakat peranan mereka yang tergolong informal leader sangat besar peranannya. Mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyat desanya. Kadang-kadang suatu program pemerintah dapat gagal karena tidak mengikusertakan para pemuka masyarakat.

Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa partisipasi masyarakat pun dipengaruhi pula oleh adanya seseorang yang menjadi pendorong atau motivator dalam suatu kegiatan.

### 2.1.8. Pentingnya Partisipasi dalam Pembangunan

Oakley (1991:14), berpendapat bahwa partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud, karena masyarakatlah yang lebih tahu akan kebutuhannya dan cara mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Adi & Laksmono (1990:174) dalam tesis M. Arifin (2007:37), partisipasi masyarakat menjadi penting dalam setiap perncanaan, program dan kegiatan sosial karena: Merupakan suatu sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Tanpa informasi ini, maka program tidak akan berhasil.

Masyarakat akan lebih antusias terhadap program/kebijakan pembangunan, apabila mereka dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan persiapan, sehingga mereka akan menganggap bahwa program atau kebijakan tersebut adalah milik merka. Hal ini perlu untuk menjamin program diterima oleh masyarakat, khususnya dalam program yang bertujan untuk merubah masyarakat dalam cara berpikir, merasa dan bertindak. Banyak negara-negara yang menganggap bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak demokrasi yang bersifat dasar, dimana masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembangunan, ini dimaksudkan untuk member keuntungan manusia.

Menurut Supriatna (2000:212), tanpa partisipasi, pembangunan justru akan mengganggu manusia dalam upayanya untuk memperoleh martabat dan kemerdekaannya. Pentingnya partisipasi masyarakat juga diungkapkan oleh Kartasasmita (1997:145), diperlukan peningkatan partipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.

Pernyataan tersebut dapat diperkuat dengan pernyataan Conyre (1991:154), menyabutkan ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu:

Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

Kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Menurut Dr. Lastarie White dalam tulisannya “Introduction Community Participation”, yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:33), mengemukakan 10 (sepuluh) alasan tentang pentingnya partisipasi dalam setiap kegiatan, yaitu sebagi berikut:

1. Dengan partisipasi, lebih banyak hasil yang dicapai,
2. Dengan partisipasi, pelayanan atau service dapat di berikan dengan biaya yang murah.
3. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, akrena menyangkut kepada harga dirinya.
4. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya.
5. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab.
6. Partisipasi menjamin bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah diusulkan.
7. Partisiapsi menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar.
8. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat didalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian.
9. Partisipasi membebaskan orang dari ketergantungan kepada keahlian orang lain.
10. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadran terhadap usaha untuk mengatsinya. Menurut Bintoro Tjokomidjojo (1976:222-224), ada 4 (empat) aspek penting dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:
11. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara, turut menetukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
12. Meningkatnya artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuam-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu sebaiknya.
13. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah di tentukan dalam proses politik.
14. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu, kelompok, serta masyarakat memperbaiki keadaan mereka sendiri, karena mereka sendirilah yang tahu akan apa yang menjadi kebutuhannya tersebut. Disamping itu merka juga akan merasa memiliki tanggung jawab tentang apa yang telah mereka hasilkan dan apa yang telah dimanfaatkan tersebut.

**2.1.9. Ciri-Ciri dan Prinsip Pembangunan Desa**

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dangan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan cirri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (183:215) yaitu:

1. Koperhensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
2. Perpaduan saran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa diwilayah kelurahahan.
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakkan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur keperibadian dengan teknologi tepat waktu.

Jadi dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang kita ingin kan.

Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya melibatkan smua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang,

**2.2. Kerangka Pemikiran**

Sejak dikeluarkan berbagai instrument hukum berupa peraturan perundang-undang (UU) atau peraturan pemerintah (PP) di tahun 1999 yang membuka lebar ruang bagi masyarakat untuk partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah secara substantive menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrument yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintah, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi rakyat, dan sebagai wahana kepentingan untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana. Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berbagi peraturan yang secara sektoral memberikan ruang bagi masyrakat untuk berpartisipasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi ,masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat utnuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan implementasinya.

Semetinya, proses pembangunan sejak awal mulai dari tahap perncanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus melibatkan masyarakat, sehingga melahirkan sebuah pembangunan yang adil, merata dan demokratis. Pembangunan yang demokratis menawarkan dan menjunjung tinggi pentingnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Melalui cara partisipatif seperti itu, maka akan melahirkan suatu keputusan bersama yang adil dari pemerintah untuk rakyatnya, sehingga akan mendorong munculnya lepercayaan public (masyarakat) terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Keputusan pemerintah yang mencerminkan keputusan rakyat yang mendorong terjadinya suatu sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Untuk lebih memudahkan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, maka digunakan konsep partsipasi dimana konsep partisipasi memusatkan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga menghasilkan produk-produk pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Davis dalam Sastropoetro (1988:16) yang menyebutkan beberapa dimensi mengenai partisipasi masyarakat.

Berasarkan beberapa konsep dan teori yang telah diterapkan sebelumnya, maka adapun kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut:

**Gambar 2.3. Kerangka Teori**

Partisipasi Masyarakat

1. Partisipasi Pikiran

2. Partisipasi Tenaga

3. Partisipasi Keahlian

4. Partisipasi Barang

5. Partisipasi Uang

Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Di Desa Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat

UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

**Sumber: Davis (Sastropoetro:1988)**

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang dilakukakan bersifat deskriptif. Narbuko & Acmhadi (2004:44) memberikan pengertian penelitaian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga mrnyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat kompratif dan juga korelatif.

Hadari Nawawi (2007;33), mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabl mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabl lain. Selain itu, penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Danim (2002;41) memberikan beberapa ciri dominan dari penelitian deskriptif, yaitu:

1. Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Adakalanya penelitian ini dimaksudkan hanya membuat deskripsi atau narasi semata-mata dari suatu fenomena, tidak untuk mencari hubungan antarvariabel, menguji hipotesis, atau membuat ramalan.
2. Dilakukan secara survey. Oleh karena itu, penelitian deskriptif disebut juga sebagai penelitian survey. Dalam arti luas, penelitian deskriptif dapat mencakup seluruh metode penelitian, kecuali bersifat historis dan eksperimental.
3. Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail.
4. Mendefinisikan masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung.
5. Mendeskripsikan subjek yang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah proyek pembangunan posyandu dari program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

**3.2. Subyek Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif , sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode puspose sampling. Puspose sampling adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi,1987:157).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Geleo Baru (1 orang).
2. Ketua BPK desa Geleo Baru (1 orang).
3. Tokoh masyarakat (3 orang ).
4. Pemuda desa Geleo Baru (1 orang).
5. Ketua Tim pelaksana kegiatan PNPM –MP desa Geleo Baru(1 orang).

**3.3.** **Fokus Penelitian**

Dalam Penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Pikiran
2. Partisipasi Tenaga
3. Partisipasi Keahlian
4. Partisipasi Barang
5. Partisipasi uang

**3.4. Teknik PengumpulanData**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain: literatur yang relevan dengan judul penelitian, misalnya materi atau dokumen-dokumen dari kantor Desa Geleo Baru, serta karya tulis yang relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara :

Wawancara, yaitu suatu cara untuk, mendapatkan data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan, yaitu Camat Barong Tongkok, para Lurah, pengurus LPM, dan beberapah tokoh masyarakat pada kecamatan Barong Tongkok yang dianggap mengetahui banyak tentang kondisi objektif dari proses penyusunan perencanaan pembangunan.

1. Observasi:

Yaitu cara untuk meperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau data yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desa Geleo Baru melalui berbagai situasi dan kondisi nyata yang terjadi baik secara formal maupun non formal.

1. Dokumentasi:

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku refrensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, literatur, laporan tahunan mengenai dokumen rencana kerja pembangunan, dokumen rumusan hasil Musrenbang, dan dokumen peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

**3.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebgai berikut:

1. Pengumpulan informasi melaui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
2. Reduksi data

Proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, informasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai deengan masalah penelitian.

1. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu di tindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang merupakan suatu langkah penting mencapai tujuan penelitian. Display data yang baik merupakan suatu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

1. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya (sugiono:2005).

**GAMBAR 1**

**KOMPONEN-KOMPONEN DATA**

**MODEL INTERAKTIF**

Penyajian Data

Pengumpulan Data

Penarikan kesimpulan

Reduksi Data

**Sumber: Matthew B Muiles dan Huberman (2005:92)**

## 3.6. Jadwal Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mencoba menyusun jadwal penelitian ini, secara garis besar penyusunan dan penelitian ini dapat diuraikan dalam jadwal sebagai berikut:

1. Bulan September penulis mengajukan judul skripsi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Sosial Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sekaligus mohon kesediaan untuk menetukan Dosen Pembimbing.
2. Pada minggu ke pertama sampai minggu ke dua bulan Oktober 2019, penulis mencoba mengajukan Proposal Skripsi kepada pembimbing.
3. Pada minggu pertama bulan desember 2019, penulis meminta surat penelitian yang ditujukan kepada Kepala Desa Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dilanjutkan mengantarkan ke tempat penelitian.
4. Minggu ke dua bulan Desember 2019 penulis melakukan penelitian dengan diawali mengumpulkan data dalam bentuk pustaka dan dilanjutkan wawancara pada pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan.
5. Minggu pertama bulan januari 2020 penulis mengolah data dan dilanjutkan pembuatan Bab selanjutnya sampai dengan Bab terakhir.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Kutai Barat.Secara lebih spesifik lagi penelitian ini mengambil lokasi di Desa Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Pengambilan lokasi penelitian du Desa Geleo Baru pada Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, ini semata-mata di dasarkan pada segi efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan penelitian, karena waktu dan biaya yang sangat terbatas maka penelitian di lokasi tersebut sangat membantu penulis.

**4.1.1. Visi**

Berdasarkan hasil musyawarah bersama, maka visi desa Geleo Baru yang telah ditetapkan untuk jangka 5 tahun (2017-2021) adalah:

“Terbangunnya Tata Kelola Kampung Geleo Baru Yang Semakin Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Maju, Adil, Sehat Dan Sejahtera”

**4.1.2. Misi**

Adapun misi Desa Geleo Baru untuk pencapaian visi adalah sebagai berikut:

1. Meroformasi tata kelola pemerintahan kampung dalam upaya menciptakan sistem pemerintahan yang semakin baik guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dasar masyarakat kampung geleo baru.
3. Mengoptimalkan peran kelembagaan, kepemudaan dan organisasi yang ada di kampung
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kampung geleo baru.
5. Menjaga dan menoptimalkan nilai budaya luhur serta nilai-nilai keagamaan dalam upaya menciptakan hubungan sosial yang harmonis.
6. Pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

**4.1.3. keadaan Sosial Ekonomi Penduduk**

**4.1.3.1. Jumlah Penduduk**

Penduduk Desa Geleo Baru terdiri atas 275 kepala keluarga dengan total jumlah jiwa adalah 929 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laiki-laki:

**Tabel 4.2. Persentase Jumlah Penduduk Desa Geleo Baru Berdasarkan Jenis Kelamin**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Laki-laki** | **Perempuan** | **Total** |
| 502 Jiwa | 427 Jiwa | 929 Jiwa |

Sumber: Data Administrasi Desa Geleo Baru

**4.1.3.2. Tingkat Kesejahteraan**

Berikut perbandingan jumlah kepala keluarga sejahtera dan kepala keluarga pra sejahtera di Desa Geleo Baru:

**Tabel 4.3. Persentase Tingkat Kesejahteraan Maayarakat Desa Geleo Baru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sejahtera** | **Pra Sejahtera** | **Total** |
| 233 KK | 42 KK | 275 KK |

Sumber: Data Administrasi Desa Geleo Baru

**4.1.3.3. Mata Pencaharian**

Desa Geleo Baru merupakan desa yang terletak di bagian Timur Kecamatan Barong Tongkok dengan persentase perbandingan jenis mata pencaharian penduduknya sebagai berikut:

**Tabel 4.4. Persentase Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Geleo Bru**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mata Pencaharian** | **Persentase** |
| Petani | 70 % |
| Swasta | 10 % |
| PNS | 10 % |
| Lain nya | 10 % |

Sumber: Data Administrasi Desa Geleo Baru

**4.1.4. Sarana Dan Prasarana**

Gambaran umum sarana dan prasarana yang terdapat di desa Geleo Baru saat inidapat dibedakan berrdasarkan fungsinya, antara lain sarana pendidikan, sarana umum, prasarana transportasi, dan sarana keagamaan.

**4.1.4.1. Sarana Pendidikan**

Dalam hal ini peningkatan sumber daya manusia, maka dalam bidang pendidikan sarana yang dimiliki oleh Desa Geleo Baru, yakni:

**Tabel 4.5. Persentase Sarana Pendidikan Desa Geleo Baru**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sarana** | **Jumlah** |
| Perpustakaan Desa | 1 |
| SMP | 1 |
| SD | 1 |
| PAUD | 1 |

Sumber: Data Administrasi Desa Geleo Baru

**4.1.4.2. Sarana Umum**

Sarana Umum yang dimiliki oleh Desa Geleo Baru saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut beserta jumlahnya:

**Tabel 4.6. Persentase Jumlah Sarana Umum Desa Geleo Baru**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sarana** | **Jumlah** |
| Lapangan Olahraga | 3 |
| Balai Pertemuan | 1 |
| Budaya/Kesenian | 1 |
| Sumur Desa | 1 |

Sumber: Data Administrasi Desa Geleo Baru

**4.1.4.3. Sarana Keagamaan**

Sarana keagamaan yang dimiliki Desa Geleo Baru saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut beserta jumlahnya:

**Tabel 4.7. Persentase Sarana Keagamaan Desa Geleo Baru**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sarana** | **Jumlah** |
| Gereja | 3 |
| Masjid | 1 |

Sumber: Data Administrasi Desa Geleo Baru

**4.1.4.4. Prasarana Transportasi**

Dalam hal akses transportasi masyarakat desa, maka saat ini prasarana transportasi yang dimiliki oleh Desa Geleo Baru adalah sebagai baerikut:

**Tabel 4.8. Persentasee Prasarana Transportasi Desa Geleo Baru**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jalan** | **Panjang** |
| Provinsi | 4 Km |
| Kabupaten | 12 Km |
| Desa | 5 Km |

Sumber: Data Administrasi Desa Geleo Baru

**4.2. Hasil Penelitian**

**4.2.1. Partisipasi Pikiran**

Dalam pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh PNPM-MP di Desa Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok proyek yang akan dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh tim pelaksana kegiatannya ataupun oleh pemerintah desa setempat melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua.

Demikian juga yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh masyarakat Desa Geleo Baru

“Pada PNPM Mandiri Pedesaan penggalian gagasannya dilaksanakan mulai tingkat dusun hingga desa” (**Tokoh masyarakat Bapak David Mokoagow, wawancara 3 januari 2020).**

Ditambahkan lagi bahwa:

“PNPM memang pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memang harus terlibat” (**Tokoh masyarakat Bapak David Mokoagow, wawancara 3 januari 2020).**

Dijelaskan oleh Kepala Desa Geleo Baru bahwa:

Secara jujur harus diakui bahwa masih terdapat sebagian warga desa kami yang meskipun telah disosialisasikan dan bahkan secara langsung diajak untuk ikut serta berpartisipasi, namun mereka tetap berpendirian bahwa proyek PNPM-MP yang dalam hal ini adalah pembangunan posyandu telah ada anggarannya sehingga bila mereka bekerja harus mendapat upah **(Kepala Desa Geleo Baru Bapak Fx.Sudiro, S.Km, wawancara: 3 januari 2020).**

Informasi tersebut menunjuukkan bahwa proyek yang dilaksanakan oleh PNPM-MP Benar merupakan proyek yang idenya digali dari masyarakat desa Geleo Baru dan telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari proses penggalian gagasan tersebut, maka lahirlah beberapa usulan yang akan mewakili kebutuhan masyarakat, yang selanjutnya akan dirancang sesuai dengan skala kebutuhan masyarakat dan dimusyawarahkan dalam musyawarah tingkat desa.

**4.2.2. Partisipasi Tenaga**

Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat desa yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan desa, khususnya dalam pengerjaan proyek-proyek fisik PNPM-MP.

Seperti yang dikemukakan oleh seorang tokoh masyarakat bahwa banyak anggota masyarakat yang terlibat dalam pengerjaan gedung posyandu atas dasar kesadaran bahwa keberadaan posyandu sangat bermanfaat bagi warga desa Geleo Baru olehnya itu, meskipun trsedia anggaran untuk pembangunan tersebut namun mereka tidak berharap dibayar. Di lain pihak, sebagaimana dikemukakan juga oleh salah seorang tokoh masyarkat bahwa pada dasarnya semua masyarakat desa Geleo Baru ingin berpartisipasi, terutama dalam bentuk tenaga **(wawancara Bapak Andreas Bengkal, wawancara: 3 januari 2020).**

Informasi tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi seorang di dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bukanlah merupakan paksaan, akan tetapi kerelaan untuk terlibat. Kerelaan itu sendiri muncul dari kesadaran bahwa keterlibatan mereka dalam bentuk partisipasi tenaga untuk mewujudkan kepentingan bagi orang banyak. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Geleo Baru, bahwa:

Masyarakat mau ikut berpartisipasi karena mereka berpikir selain mereka ingin melihat pembangunan di daerahnya baik juga mereka berpikir bahwa hal tersebut juga bermanfaat bagi mereka **(Kepala Desa Geleo Baru Bapak Fx.Sudiro,S.Km, wawancara:24 januari 2020).**

Demikian juga dikemukakan oleh Kepala Desa Geleo Baru bahwa:

Banyak warga yang tidak sempat berpartisipasi karena memang di Desa Geleo Baru masih banyak warga yang apabila mereka tidak bekerja dlam beberapa hari, maka mereka tak akan bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan mereka, dan mata pencaharian yang paling dominan adalah *Menores* bahasa dayak: bekerja menyadap karet **(Kepala Desa Geleo Baru Bapak Fx.Sudiro, S.Km, wawancara: 3 januari 2020).**

**4.2.3. Prtisipasi Keahlian**

PNPM-MP merupakan program yang mempunyai transportasi yang baik serta mengupayakan keterlibatan penuhnya masyarakat didalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu proyek yang telah ditetapkan oleh desa geleo baru dari adanya program PNPM-MP, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat untuk membahas langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar peoyek dapat terlaksana dengan baik dengan memperhatikan kualitas dari proyek tersebut.

Dalam pelaksanaan proyek secara teknis juga dapat terlepas dari pemanfaatan sumber daya yang terdapat di desa bersangkutan. Hali ini dikecualikan jika sumber daya yang dimaksudkan tidak terdapat di desa, seperti yang di kemukakan oleh kepala Desa Geleo Baru:

“semua pekerja proyek adalah orang asli desa, misalnya bagi yang memiliki keahlian sebagai tukang batu, silahkan kerjakan yang bagian pemasangan batu, tetap diberi upah kerja. Dan sebagai partisipai mereka, maka upah yang mereka minta tidak seperti jika mereka bekerja biasanya” (**Kepala Desa Geleo Bapak Fx. Sudiro, S.Km wawancara Baru 5 januari 2020).**

Hal yang senada juga dikemukakan oleh ketu BPK Desa Geleo Baru:

“Untuk masalah pengerjaan yang sifatnya membutuhkan keahlian, maka dicari pula masyarakat di desa yang betul-betul ahli dalam bidang tersebut” (**Ketua BPK desa Geleo Baru Bapak Simon, wawancara: 5 januari 2020).**

**4.2.4. Partisipasi Barang**

Barang yang dimaksud adalah barang-barang yang dimiliki oleh warga desa yang secara sukarela disumbangkan kepada desa. Dari bantuan-bantuan yang dimaksud maka pengeluaran pembangunan fisik posyandu dapat di tekan sehingga ada sisa yang selanjutnya digunakan untuk pengadaan pagar dibagian depan dan samping posyandu. Dikemukakan oleh bapak Tusin selaku ketua tim pelaksana kegiatan PNPM-MP, bahwa:

Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang yakni pembangunan posyandu, jadi tanah yang digunakan sebagai lokasi adalah hasil dari swadaya masyarakat dalam bentuk barang **(Ketua tim pelaksana kegiatan PNPM-MP Bapak Tusin, wawancara: 8 januari 2020).**

Informasi ini kiranya jelas memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Geleo Baru memiliki kesadaran dan kerelaan yang cukup memadai dalam rangka pembangunan desa mereka. Dipandang dari sudut ekonomi, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang memiliki kekayaan yang berlebihan sehingga sebagian dari harta mereka disumbangkan kepada desa.

Akan tetapi meskipun kehidupan mereka masih dlam taraf sederhana mereka tetap rela untuk menyumbangkan sebagian dari milik mereka untuk kepentingan pembangunan desa khususnya pembangunan posyandu pada tahun 2018.

**4.2.5. Partisipasi Uang**

Disampaikan oleh semua informan bahwa tidak terdapat partisipasi masyarakat dalam bentuk uang pada saat pembangunan kurang lebih empat bulan dilaksanakan. Kalau ada hal itu diwujudkan dalam bentuk minuman seperti kopi, sirup dan lainnya untuk konsumsi bagi masyarakat turut terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh tim pelaksana kegiatan PNPM-MP bahwa:

Untuk partisipasi masyarakat dalam bentuk uang selama selama ini belum pernah karena dana yang dianggarkan dari PNPM-MP belum pernah kurang, kadang memiliki sisa dari pengerjaan satu proyek yang dapat dijadikan revisi untuk proyek lain **(Ketua Tim Pelaksana Kegiatan PNPM-MP Desa Geleo Baru Bapak Tusin, Wawancara: 5 januari 2020).**

Dari penjalasn tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan proyek dari PNPM-MP memang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan tentunya hal tersebut tidak dapat di lepaskan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, karena tanpa adanya sosialisasi, maka kendati terdapat minat masyarakat dalam berpartisipasi akan tetap menyurutkan hal tersebut.

Dengan adanya sosialisasi yang baik, maka informasi yang didapatkan dari sosialisasi akan dapat menjadi pemicu terhadap timbulnya partisipasi. Dari penelitian di lapangan ditemukan bahwa di desa Geleo Baru sifat gotong royong masyarakat masih sangat tinggi, hanya saja bagaimana peran dari pemerintah desa dalam mengarahkannya dan mensosialisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh masyarakat:

“Semangat gotong royong di Desa Geleo Baru ini Puji Tuhan masih sangat kental, dan mereka sangat bersemangat apabila mereka dipanggil untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan**”(Tokoh Pemuda Desa Geleo Baru Bapak Roby, wawancara: 5 januari 2020).**

Berdasarkan hasil penelusuran informasi ditemukan bahwa di lokasi penelitian, perhatian pemerintah desa dalam mengarahkan masyarakat sangatlah baik serta dalam setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan asalkan proyek tersebut jelas seperti dari PNPM-MP pemerintah desa selalu melakukan sosialisasi yang baik, seperti yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat bahwa:

“setiap ada sesuatu yang akan dikerjakan, misalnya membicarakan masalah pembangunan, maka pemerintah desa selalu menyampaikan kepada masyarakat, mereka tidak bertindak sendiri**”(Tokoh masyarakat desa Geleo Baru Bapak Andreas Bengkal, wawancara: 5 januari 2020).**

Informasi tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah desa dalam setiap kegiatan pembangunan yang di lakukan di desa sangat baik begitu pula dengan penyambutan dari masyarakat yang begitu antusias dalam setiap kegiatan pembangunan.

Dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mnadiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat, maka tingkat antusiasme masyarakat desa dalam berpartisipasi dapat disandingkan, sehingga dapat melahirkan pembangunan desa sesuai dengan yang menjadi harapan, yakni pembangunan partisipatif yang sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita negeri ini serta menjadi pembenaran tentang teori pembangunan yang sifatnya bottom up (dari bawah ke atas). Meskipun demikian halnya, namun dalam pelaksanaan proyek PNMP-MP tersebut masih belum dapat terlepas dari adanya hambatan. Seperti yang didapatkan pada lokasi penelitian dimana pola pikir dari masyarakat mengenai proyek pembangunan yang masih selalu berfikir bahwa semua proyek pembangunan merupakan hal yang mendatangkan keuntungan bagi tim pelaksananya meskipun tidak demikian adanya, seperti informasi yang disampaikan oleh tim pelaksana kegiatan PNPM-MP desa Geleo Baru bahwa:

“Hanya saja di PNPM-MP kendalanya adalah masyarakat kadang mengira bahwa pengerjaan PNPM-MP seperti pengerjaan proyek yang biasanya, dalam artian bahwa mereka kadang berfikir bahwa pengurus PNPM-MP pasti mendapat banyak untung, misalnya kalau ada sisa dana pasti kami kami yang akan mengambil sisa dana tersebut, padahalkan yang kami dapat hanyalah upah operasional saja**”(Ketua tim pelaksana kegiatan PNPM-MP desa Geleo Baru Bapak Tusin, wawancara: 8 januari 2020).**

Munculnya pembahasan proyek pembangunan dari PNPM-MP dalam skripsi ini dikarenakan oleh proyek pembangunan yang dikontrol oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui mekanisme penggalian gagasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) ternyata belum berjalan sesuai dengan yang telah dikonsepkan dan masih terdapat banyak celah terutama dalam hal pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan pihak ketiga dalam hal ini kontraktor, sehingga mustahil untuk menghadirkan partisipasi masyarakat didalamnya, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Geleo Baru bahwa:

“Dalam proyek pembangunan dari pemerintah daerah yang ditanagani oleh BAPPEDA dengan menggunakan pihak ketiga, jangankan partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, keahlian, barang, atau uang, partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran pun tidak ada. Sangat tidak menarik, hanya saja masyarakat tdak dapat menolak. Berbeda dengan program pembangunan yang ditangani oleh PNPM-MP yang ada di desa ini, masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan program atau proyek pembangunannya, karena betul-betul melibatkan masyarakat, mulai dari mengumpulkan masyarakat dan membicarakan bersama mengenai program atau proyek yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat betul-betul berpartisipasi, mulai dari pikiran, tenaga, keahlian, barang kalau dibutuhkan bahkan uang sekalipun”**(Kepala Desa Geleo Baru Bapak Fx. Sudiro, S.Km, wawancara: 9 januari 2020).**

Demikian pula yang diungkapkan okeh salah seorang tokoh masyarakat bahwa:

“kalau untuk proyek pembangunan yang diturunkan dari hasil Musrenbang yang kemudian pelaksanaannya dikerjakan oleh kontraktor memang partisipasi tidak ada”**(Tokoh masyarakat Desa Geleo Baru Bapak Reydi Timporok, wawancara: 15 januari 2020).**

Dari informasi tersebut dapat dismpulkan bahwa jika proyek dari hasil MUSRENBANG yang akan dijadikan sebagai unit analisis untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat, maka akan menjadi hal yang mustahil dilakukan, sehingga dengan demikian mesti ada opsi lain yang dapat dijadikan sebagai alternative pengganti, yaitu dengan menjadikan salah satu proyek dari PNPM-MP yang diperoleh desa Geleo Baru sebagai tolak ukurnya dalam hal ini proyek yang dianggarkan untuk tahun 2018, yakni pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang selanjutnya secara kualitatif ditelusuri melalui dimensi-dimensi sebagaimana dikemukakan oleh Davis yang dikutip oleh Satropoetro (1988:16), terdiri atas: partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keahlian, partisipasi barang, dan partisipasi uang.

**BAB V**

**PENUTUP**

**5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahsan diatas maka dapat disimpulkan bahwa berikut beberapa kesimpulan hasil penelitian:

1. Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun dan mengarahkan partisipasi masyarakat Desa Geleo Baru, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa tersebut telah cukup memadai khususnya dalam rangka pelaksanaan proyek PNPM-MP di desa mereka pada tahun 2018.
2. Dari lima jenis partisipasi yang diteliti, ternyata bentuk partisipasi tenaga, keahlian, barang, uang memiliki sumbangan yang sangat baik dalam pengerjaan proyek PNPM-MP khusus nya pembangunan Posyandu pada tahun 2018, partisipasi yang lainnya yaitu partisipasi pikiran bisa dikatakan masih kurang dikarenakan masyarakat selalu beranggapan bahwa proyek PNPM-MP merupakan proyek pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan proyek PNPM-MP tersebut.
3. Kepala Desa Geleo Baru beserta aparatnya cukup aktif dan berhasil menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakatnya sehingga cukup berhasil dalam menyelesaikan salah satu proyek PNPM-MP yaitu POSYANDU sebagaimana diharapkan oleh masyarakat desanya.

**5.2. Saran**

1. Diharapkan agar Kepala Desa dan aparatnya semakin gigih dalam berupaya memperjuangkan dana proyek PNPM-MP sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat desanya.
2. Agar Kepala Desa beserta jajarannya semakin menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat dan dengan masyarakat desa secara keseluruhan sehingga pertemuan-pertemuan yang mereka selenggarakan di masa yang akan datang dapat melahirkan gagasan-gagasan dan keputusan-keputusan yang lebih baik guna menyukseskan setiap program dan proyek yang telah berhasil diperjuangkan oleh Kepala Desa.
3. Agar Kepala Desa dan aparatnya serta tokoh-tokoh masyarakat Desa Geleo Baru senantiasa bersinergi untuk membangun partisipasi masyarakat khususnya partisipasi dalam wujud pikiran sehingga pembangunan di Desa Geleo Baru berjalan lebih meningkat lagi.

# DAFTAR PUSTAKA

Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.

Adi, Isbanda Rukminto. 2001. Pemberdayaan, Pembangunan Masyarakat, dan dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Arif, Syaiful. 2006. Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan. Malang: Averroes Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosesdur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyad, Lincoln. 2002. Pengatar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta.

Cponyers, Diana. 1991. “*An Introduction to SocialmPlaining in The Third World”.* By Jhon Wiley & Sons Ltd. 1994. Terjemahan Drs. Susetiawan. SU: “Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Data Administrasi Kantor Desa Geleo Baru. 2019.

Hasan, Iqbal M. 2002. Metode Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Pembangunan untuk Rakyat (pertumbuhan dan Pemerataan). Jakarta: CIDEAS.

Khairuddin. 1992. Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek: Sosiologi. Ekonomi, dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty

Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga. Ndraha, Talizudhu. 1987. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat tinggal Landas, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Sastropoetro, Santoso R.A. 1988. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional.

Sugiono, 2004. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

**Pertaturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

**LAMPIRAN**

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

1. Bagai mana tingkat partisipasi masyarakat di Desa Geleo Baru?
2. Apakah semua masyarakat terlibat dalam pembangunan yang ada?
3. Apa yang menjadi visi dan misi Desa Geleo Baru?
4. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di Desa?
5. Apakah masyarakat mau diajak berpartisipasi dalam pembanguna posyandu tersebut tanpa diberi upah
6. Bagaimana dengan masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya yaitu menores karet apakah sempat ikut berpartisipasi dalam pembangunan posyandu tersebut?
7. Apakah pekerja proyek tersebut asli orang desa semua?
8. Tanah yang digunakan untuk membangun posyandu apakah milik masyarakat atau milik pemerintah desa?
9. Jenis partisipasi apa yang paling dominan dilakukakan masyarakat?
10. Apakah yang menjadi kendala dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi?
11. Dari kelima partisipasi tersebut partisipasi apa yang dianggap masih kurang?

Dokumentasi saat melakukan penelitian di kantor Desa Geleo Baru

****

Dokumentasi saat wawancara dengan masyarakat

****

****

****

****

Gedung Kantor Desa Geleo Baru

****

Gedung Serba Guna Desa Geleo Baru

****

**Lamin Adat Desa Geleo Baru**



Gedung Posyandu Desa Geleo Baru